

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu dari penelitian ini merupakan pendahuluan akan dibahas tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu keadaan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, melainkan juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindakan kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar misalnya keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, pengaruh eksternal seperti naik turun harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dan regulasi lain yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari sudut pandang ekonomi, penyebab kemiskinan seperti pendapatan yang rendah, kesempatan

kerja terbatas, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu timbul dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1995). Kemiskinan adalah salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan mencakup miskin terhadap aset, rendahnya keikutsertaan organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Kemiskinan menjadi masalah penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Sudah lebih dari lima puluh tahun Indonesia dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia jauh dari harapan kemakmuran dan kesejahteraan. Kondisi kemiskinan Indonesia pasca krisis 1998 secara persentase dan jumlah penduduk miskin perlahan mengalami penurunan seiring dengan berbagai perbaikan ekonomi yang terjadi pada berbagai bidang

(Maipita, 2014). Tetapi pada Maret 2006 kemiskinan meningkat menjadi 17,25 persen. Selama periode 2005-2006 terjadi beberapa peristiwa, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada Oktober 2005 membuat harga bahan bakar minyak naik sampai 114 persen secara keseluruhan dan harga minyak tanah naik tiga kali lipat, lalu kenaikan harga beras sebesar 33 persen antara Februari 2005 dan Maret 2006 yang disebabkan oleh kelangkaan beras akibat adanya larangan impor beras. *World Bank* memperkirakan larangan impor beras dan kenaikan harga beras merupakan faktor utama di balik kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan Indonesia telah mencapai prestasi luar biasa, yaitu dengan menurunnya angka kemiskinan hingga lebih dari setengahnya sejak 1999 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 9,78 persen pada tahun 2020. Sebelum krisis pandemi COVID-19, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan belakangan ini Indonesia telah memenuhi syarat untuk masuk ke negara-negara berpenghasilan menengah ke atas. Kemiskinan Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya secara perlahan dan konsisten. Namun penduduk miskin masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai resiko. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan selalu di canangkan dalam program pembangunan. Rencana pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2025. Rencana-rencana tersebut di bagi menjadi rencana jangka menengah lima tahun yang di sebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan masing-masing rencana tersebut memiliki fokus pembangunan yang berbeda-beda. Rencana

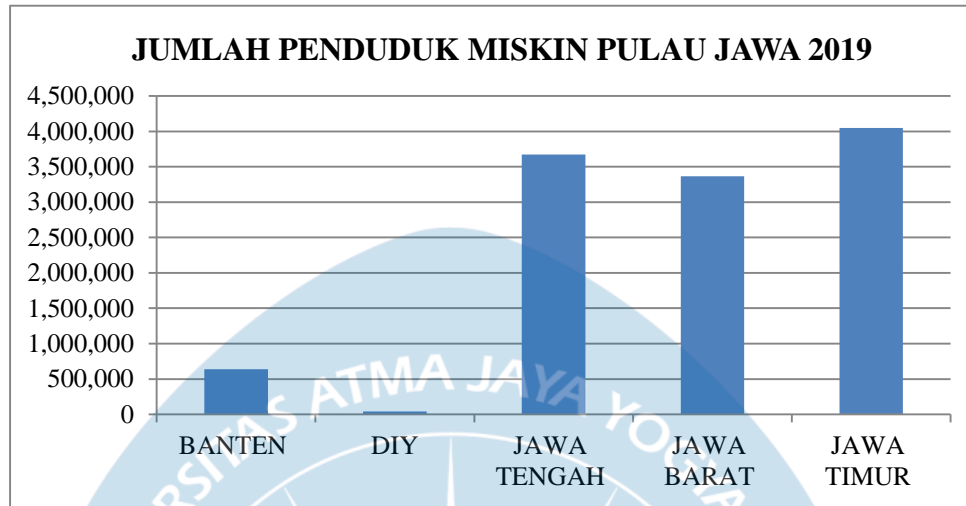
pembangunan jangka menengah (tahap akhir dari rencana jangka panjang) yang sedang berjalan dari tahun 2020 hingga 2024 bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing di pasar global. Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain itu, krisis global akibat pandemi COVID-19 telah membawa kesulitan yang sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia ataupun di dunia untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini *World Bank* mendukung tanggap darurat COVID-19 di Indonesia, termasuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Upaya ini sangat penting untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan produktif. Menurut indeks modal manusia *World Bank*, saat ini hanya 54 persen generasi penerus di Indonesia yang memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lengkap. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila GDP riil negara tersebut naik dan stabilitas ekonominya. Kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka harus di arahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia tersebar di 34 provinsi. Sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah tertentu. Hal ini diakibatkan karena permasalahan kemiskinan dimasing-masing daerah sangat

beragam, sehingga solusi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan di setiap daerah pun juga akan berbeda, untuk itu perlu dicari masalah yang menyebabkan kemiskinan di setiap daerah. Menurut Kuncoro (1997:131) penyebab negara menjadi miskin karena, menguntungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, dan metode produksi yang tradisional seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Lapangan pekerjaan yang terbatas merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Hal ini disebabkan meskipun seseorang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun peluangnya cukup rendah untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan (*skill*) dan modal. Akibat dari lapangan kerja yang terbatas yaitu tingkat pengangguran tinggi karena rendahnya pendidikan. Masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, sehingga membuat mereka kurang bekal keterampilan dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingginya angka pengangguran merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Menurut Samuelson dan Nordhaus pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pertambahan jumlah pengangguran akan menambah jumlah penduduk miskin karena tidak mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



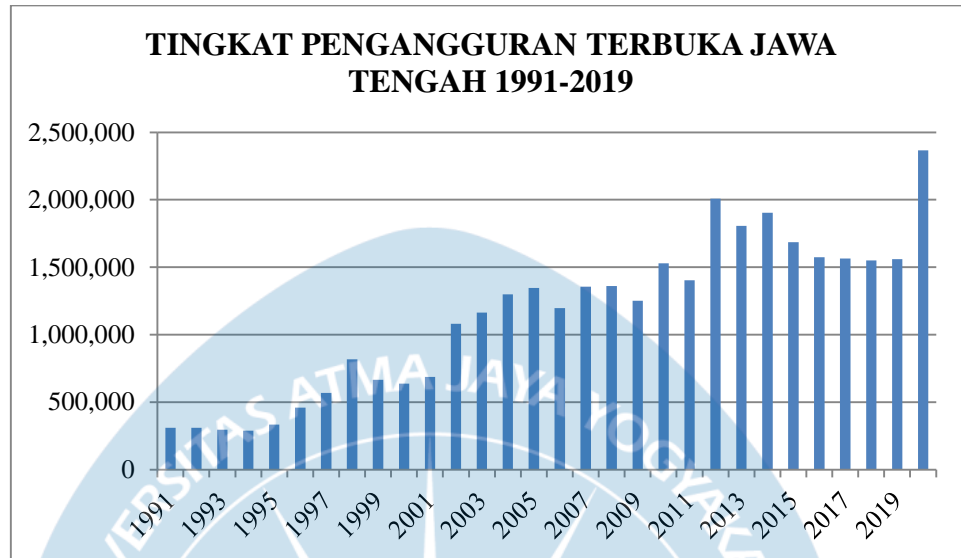
Gambar 1.1
Penduduk Miskin Pulau Jawa 2019 (jiwa)
 Sumber: BPS Indonesia Tahun 2019.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa data penduduk miskin di pulau Jawa, penduduk miskin terbanyak yaitu provinsi Jawa Timur sebesar 4.048.342 jiwa. Jawa Tengah menempati posisi ke dua mencapai 3.673.185 jiwa pada tahun 2019. Stella Maris (2020) dalam media Liputan6 menyebutkan bahwa persentase kemiskinan di Jawa Tengah per September turun 0,22 persen menjadi 10,58 persen dibandingkan Maret 2019 sebesar 10,80 persen. Angka ini masih rendah dari Papua, meski lebih banyak di Jawa Tengah, namun persentase turun menjadi 0,98 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018 hingga September 2019. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 188.020 juta jiwa dari 3.867 juta menjadi 3.679 juta jiwa. Hal ini di sebabkan oleh kepemilikan sumber daya yang tidak merata dan ketidakseimbangan kemampuan masyarakat, kesempatan yang tidak setara untuk berbisnis dan

memperoleh pendapatan akan menyebabkan partisipasi yang tidak setara dalam pembangunan. Berdasarkan faktor tersebut dapat dipastikan jika kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Umumnya penyebab kemiskinan berasal dari sifat malas masyarakat untuk berusaha dan tingkat pengangguran tinggi. Angka kemiskinan di provinsi Jawa Tengah masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa lainnya. Maka perlu di cari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Pengangguran bisa disebabkan oleh angkatan kerja yang tumbuh cepat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari waktu yang lalu hingga waktu yang akan datang kesempatan kerja bagi tenaga kerja semakin berkurang. Kurangnya kesempatan kerja menyebabkan semakin bertambahnya angka pengangguran, sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan. Dalam tiga puluh tahun terakhir dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka dalam gambar berikut:



Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Sumber: BPS Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa peningkatan tertinggi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.558.847 jiwa, di sebabkan oleh pandemik COVID-19 yang terjadi pada awal 2019 yang mengakibatkan para pekerja mengalami pemecatan besar-besaran karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran, namun masih belum mencapai seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja. Pertumbuhan angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan tidak dapat terserap secara keseluruhan di dunia kerja sehingga terjadi pengangguran terbuka yang jumlahnya mengalami penurunan dan peningkatan sampai tahun 2019.

Jawa Tengah dengan luas 32.801 km^2 dengan 29 kabupaten dan 6 kota menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan tingkat kemiskinan penduduk.

Permasalahan di pemerintahan provinsi Jawa Tengah yaitu angka melek huruf dan masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat, untuk mencari solusi atau jalan keluar dengan merumuskan strategi sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

Pada dasarnya pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Cara terbaik mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju

pertumbuhan penduduk ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut maka angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara langsung terjadi juga peningkatan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Kausalitas Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2020”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bab latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan kausalitas antara variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 sampai 2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi hubungan kausalitas antara tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 sampai 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya dan dapat di gunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini di harapkan menjadi salah satu referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait kemiskinan.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah, maka akan dijelaskan hubungan sementara antara variabel-variabel terkait untuk diuji ada atau tidaknya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil hipotesis sementara penelitian ini diduga terdapat hubungan kausalitas antara tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2020.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Adapun untuk masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Untuk mendukung metode penyelesaian masalah, akan dijelaskan metode penelitian termasuk data-data yang akan digunakan serta model analisis empirik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisis tentang teori-teori yang berkaitan dengan kemiskinan, dan studi atau riset riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai obyek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi mengenai gambaran umum tentang objek penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil dan pembahasan yang disajikan pada bab IV, semua akan di simpulkan pada bab V ini.

